

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MISKIN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT  
BERBASIS POTENSI LOKAL  
DI KABUPATEN PANIAI**

Ayub Adii

NPP. 31.1020

*Asdaf Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

E-mail: [ayubadii24@gmail.com](mailto:ayubadii24@gmail.com)

Pembimbing skripsi : Dra. Karolina R.S. Wenggi, MH

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Poverty is one of the most complex social problems and affects many aspects of human life. Based on the list of the poorest districts in Indonesia, Paniai district ranks sixth with the highest poverty rate in Indonesia, so there is a *collaborative governance* program in tackling the problem of extreme poverty. **Objective:** The purpose of this study is to describe the role of *stakeholders* in poverty alleviation through *collaborative governance*, the impact of collaboration in poverty alleviation through *collaborative governance* and to find out the supporting factors, inhibitions and efforts to overcome poverty problems through *collaborative governance*. **Methods:** This study uses Ansell and Gash's collaborative governance theory in the Collaboration Process dimension which consists of five indicators, namely Face-to-Face Dialogue, Building Trust, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Interim Results. The approach used in this study is qualitative-descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. **Results/Findings:** The results of the assessment of 5 indicators are 4 indicators that are quite effective and 1 indicator that is not yet effective because the government does not provide support and funding to YAPKEMA to provide socialization and dialogue to the community, this has an impact on the lack of people involved in community empowerment programs in reducing poverty problems. **Conclusion:** although there was a decrease in the poverty rate from 36.63% to 35.39% in the 2022-2023 period, this change has not achieved the next significant impact in overcoming the poverty problem. The obstacle faced by the Government and YAPKEMA is the lack of public awareness of the local potential of Paniai coffee. In addition, the government does not provide enough support to YAPKEMA to provide socialization and promotion of the Paniai coffee flagship program, the government should allocate a sufficient budget to YAPKEMA. Furthermore, the government should prioritize the clearing of large-scale coffee plantations as is done by coffee farms in Brazil. And employing local residents to improve social welfare and reduce extreme poverty in Paniai district.

**Keywords:** Extreme Poverty, Collaboration Governance, Paniai Coffee

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Berdasarkan daftar kabupaten termiskin se-Indonesia kabupaten Paniai menempati peringkat ke enam dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, maka hadirilah program *collaborative governance*

dalam menanggulangi masalah kemiskinan ekstrim. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan melalui *collaborative governance*, dampak kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui *collaborative governance* dan untuk mengetahui faktor pendukung, penghambat dan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui *collaborative governance*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash dalam dimensi Proses Kolaborasi yang terdiri dari lima indikator yakni Dialog tatap muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap Proses, Pemahaman bersama, dan Hasil Sementara. Adapun pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini ialah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penilaian dari 5 indikator terdapat 4 indikator yang sudah cukup efektif dan 1 indikator yang belum efektif dikarenakan pemerintah kurang memberikan dukungan dan pendanaan kepada YAPKEMA untuk memberikan sosialisasi dan dialog kepada masyarakat hal ini berdampak pada kurangnya masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan. **Kesimpulan:** meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari 36,63% menjadi 35,39% dalam periode 2022-2023, perubahan ini belum mencapai dampak yang signifikan selanjutnya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dan YAPKEMA adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal kopi Paniai. Selain itu, pemerintah kurang memberikan dukungan kepada YAPKEMA untuk memberikan sosialisasi dan promosi terhadap program unggulan kopi Paniai, pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran yang cukup kepada YAPKEMA. Selanjutnya pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembukaan lahan perkebunan kopi berskala besar seperti yang di lakukan oleh pertanian kopi di Brazil. Dan memperkerjakan penduduk lokal agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan ekstrim di kabupaten Paniai.

**Kata Kunci : Kemiskinan Ekstrim, Pemerintahan Kolaboratif, Kopi Paniai**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Negara Indonesia, dalam komitmennya untuk mendorong kemajuan kesejahteraan umum, memiliki tugas penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sosial serta ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28C ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 28H ayat (3) Konstitusi 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial ini, salah satu hal yang ditekankan adalah melaksanakan program-program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Masalah kemiskinan seolah menjadi permasalahan yang tidak akan ada habisnya, utamanya pasca covid-19 yang telah melanda Indonesia. Sudah lima tahun Covid-19 berlalu Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan 0,18% terhadap September 2022 yakni 9,54%. Meskipun terjadi

penurunan pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi dan perlu dilakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang lebih intensif. Sebagai negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, Indonesia memiliki beberapa program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),(Sari et al., 2024). Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Provinsi Papua, yang terletak di bagian timur Indonesia, adalah salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Daerah ini memiliki potensi alam yang kaya dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis yang luas, tambang mineral berharga, serta potensi perikanan yang besar di sekitar pesisirnya. Sumber daya alam yang melimpah ini memberikan peluang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, Papua masih menghadapi masalah kemiskinan selama bertahun-tahun. Berdasarkan data BPS Dalam empat tahun 2020-2023 terjadi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 menjadi 26,8%. Meskipun terjadi penurunan Provinsi Papua secara konsisten masih menempati peringkat pertama dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua memiliki keterkaitan erat dengan kondisi di berbagai kabupaten di dalamnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah melalui dataindonesia.id, terlihat bahwa delapan kabupaten di Provinsi Papua mendominasi dalam daftar kabupaten dengan presentasi jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, Berdasarkan data yang dirilis oleh Dataindonesia.id tahun 2022. Kabupaten Intan Jaya memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan persentase kemiskinan sebesar 42,03 persen. Kabupaten Deiyai berada di peringkat kedua dengan persentase penduduk miskin sebesar 40,31 persen, diikuti oleh Kabupaten Lanny Jaya dengan persentase sebesar 37,76 persen. Meskipun tidak masuk dalam tiga besar, Kabupaten Paniai masih termasuk dalam delapan besar kabupaten termiskin di Indonesia, dengan menempati peringkat ke enam dengan tingkat kemiskinan sebesar 36,63 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan data BPS dalam 4 tahun terakhir (2019-2022), Kabupaten Paniai mencatat tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mencapai 37,61%; meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 (36,71%) dan tahun 2021 (36,59%), namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 36,63%. Angka ini masih jauh tertinggal dari harapan dan bahkan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Faktor-faktor yang mendasari tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Paniai perlu mendapatkan perhatian serius karena hal ini mencerminkan tidak setaraan ekonomi yang signifikan dan akses terhadap layanan dasar yang masih terbatas. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang isinya memberikan tugas kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai tugas dan kewenangan masing-masing Instansi. Hal ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Dalam upaya mencapai target nol persen kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2024, situasi Kabupaten Paniai menunjukkan bahwa masih ada jarak yang sangat besar yang perlu diatasi. Hal ini memerlukan upaya ekstra dan perubahan kebijakan yang signifikan agar Kabupaten Paniai dapat mengurangi kemiskinan ekstrem secara substansial dalam waktu yang terbatas. Pemerintah perlu bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mengidentifikasi solusi yang efektif dan berkelanjutan guna memastikan bahwa masyarakat di Kabupaten Paniai juga merasakan manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan yang ada. Kesenambungan dan sinergi antara tingkat lokal, regional, dan nasional akan menjadi kunci dalam mencapai target pengentasan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui *Collaborative Governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008). Bahwa *Collaborative Governance* merupakan pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang mengedepankan proses konsensus. Ansell dan Gash mengidentifikasi beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Melalui kolaborasi ini, setiap pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dengan keahlian, sumber daya, dan pengetahuan yang mereka miliki. Sebagai hasilnya, *Collaborative Governance* menjadi metode yang efektif dalam menyusun kebijakan dan strategi komprehensif untuk menghadapi tantangan kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah terletak pada tingginya masalah kemiskinan di kabupaten Paniai periode 2019-2022, Kabupaten Paniai mencatat tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mencapai 37,61%; meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 (36,71%) dan tahun 2021 (36,59%), namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 36,63%, angka ini menempatkan kabupaten Paniai pada posisi ke enam dalam daftar kabupaten dengan jumlah kemiskinan terbanyak di Indonesia. dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah kabupaten Paniai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sudah melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal kopi Paniai, kolaborasi ini dilakukan antara Pemerintah, Yayasan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan petani Kopi Paniai.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks *Collaborative Governance* dan pemberdayaan masyarakat.

- A. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliah & Yusriah membahas tentang *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru pada tahun 2021 (Amaliah & Yusriah, 2021). Persamaan penelitian terdapat pada model *Collaborative Governanc* dan Pembahasan tentang kemiskinan sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan yakni CGR (*Collaborative Governance Regime*) oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh.
- B. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk. tentang *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 (Handayani et al., 2023). Persamaan penelitian terdapat pada model *Collaborative Governance*, teori yang digunakan dan Pembahasan mengenai Kemiskinan, Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian dan instansi penelitian.
- C. Penelitian yang dilakukan Fatimah, dkk. tentang *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo Tahun 2021 (Fatimah et al., 2021). Persamaan penelitian terdapat pada model *Collaborative Governance* dan pembahasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023.
- D. Penelitian yang dilakukan oleh Sapioper, dkk. Membahas tentang Emas Merah Paniai Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal pada tahun 2022 (Sapioper et al.,2022). Persamaan penelitian terdapat pada Pembahasan mengenai pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal kopi Paniai, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada teori dan hasil temuan penelitian.
- E. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila, dkk. Membahas tentang *Collaborative Governance* dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 (Salsabila et al.,2022). Persamaan penelitian terdapat pada Model *Collaborative*

*Governance*, Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan pembahasan mengenai program pengentasan kemiskinan, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada teori yang digunakan menurut Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 sedangkan penulis menggunakan teori dari ansell dan ghas.

- F. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Inka Nusamuda membahas tentang Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif *Collaborative Governance* Di Kota Mataram tahun 2023 (Pratama & Inka Nusamuda 2023). Persamaan penelitian terdapat pada Model *Collaborative Governance*, Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pembahasan mengenai program pengentasan kemiskinan sedangkan, perbedaan penelitian terdapat pada teori yang di gunakan menurut (Chiheum & Youngchai, 2018), sedangkan penulis menggunakan teori ansell dan ghas.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana topik penelitian yang dilakukan yakni *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan masyarakat Miskin melalui program pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, metodenya yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan sama dengan penelitian terdahulu yakni model *Collaborative Governance* namun peneliti menggunakan teori ansel dan ghas sedangkan Yusriah amaliah, Putri Fatimah, Hiskia C. M. Sapioper,dkk. Menggunakan teori lain sedangkan Nur Handayani,dkk. Menggunakan teori ansel dan ghas dengan indikator kondisi awal, design institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi sedangkan penulis menggunakan satu indikator yakni proses kolaborasi.

#### 1.5. Tujuan

Untuk mengkaji dan menganalisis peran *stakeholder*, dampak kolaborasi terhadap penanggulangan kemiskinan serta melihat faktor pendukung, penghambat dan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui *collaborative governance* di Kabupaten Paniai.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian deskriptif dan metodologi induktif. Miles dan Huberman dalam Sirajuddin Saleh (2017) mengklaim bahwa pendekatan kualitatif dapat di gunakan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 1 orang, Kepala Bidang Penataan dan Kerja sama Kampung 1 orang, Direktur Yayasan Pembangunan Ekonomi Masyarakat 1 orang, koordinator *Green House* kopi Owa 1 orang dan Petani kopi 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori *collaborative governance* yang digagas oleh ansel dan ghas terdapat empat dimensi yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan Proses kolaborasi. Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada satu dimensi yakni proses kolaborasi, sebab peneliti hanya ingin melihat dan memfokuskan penelitian ini terhadap proses antar pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan ekstrim, indikatornya terdiri dari Dialog tatap muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen Terhadap Proses, Pemahaman Bersama dan Hasil Sementara.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis program Kebijakan Pulang Kampung Melalui Program Unggulan Petani Kopi menggunakan pendapat dari Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa Proses Collaborative Governance dapat terjadi pada lima tahap indikator, yaitu Dialog tatap muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen Terhadap Proses, Pemahaman Bersama dan Hasil Sementara. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Dialog tatap muka

Kolaborasi pemerintahan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Lokal Kopi Paniai juga melalui proses yang telah disebutkan dalam teori Ansell dan Gash. Pada tahun 2019 dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung menggandeng yayasan pengembangan kesejahteraan masyarakat (YAPKEMA) untuk melakukan dialog tatap muka dalam meningkatkan kemampuan penanaman kopi, maka dilakukanlah serangkaian dialog interaksi berupa pelatihan, penyediaan peralatan, dan bimbingan kepada kelompok petani kopi yang menjadi target. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 108 orang, termasuk perwakilan petani kopi, kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh agama, Sosialisasi dan Dialog tersebut dilaksanakan di dua kawasan yakni wilayah Paniai Barat dan Paniai utara. Seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

Dialog Dan Sosialisasi Kepada Perwakilan Petani Kopi, Toko Adat Dan Toko Agama

Wilayah	Jumlah		Perwakilan Petani Kopi, Toko Adat dan Toko Agama	Tempat
	Distrik	Kampung		
Paniai Barat	3 distrik	13 kampung	54 orang	Aula Paroki St. Fransiskus Obano
Paniai Utara	6 distrik	19 kampung	54 orang	Ruang kelas SMP Negeri 1 Agadide
<b>Jumlah 108 orang</b>				

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab Paniai

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat, Henok Pigai, disimpulkan bahwa pertemuan antara para pemangku kepentingan diadakan secara berkala guna membahas program pengembangan ekonomi rakyat. Dukungan konkret diberikan dalam bentuk pelatihan, pengadaan peralatan, dan pendampingan kepada kelompok petani yang menjadi sasaran program. Pada tahap awal pelaksanaan, upaya sosialisasi dan dialog dilakukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan kecocokan program dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, dari pernyataan Sekretaris Distrik Fajar Timur, Derek kadepa, yang juga seorang petani kopi, pada 10 Januari 2024, pukul 11.25 WIT di kantor Distrik Fajar Timur, terlihat bahwa pemerintah memiliki strategi dengan membuka akses ke layanan perbankan seperti ATM dan memberikan insentif secara berkala untuk mencapai kesepakatan bersama. Derek juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, terutama dalam pengembangan kopi Paniai, dan mengapresiasi pemerintah karena telah melibatkan anak-anak asli setempat dalam program tersebut. Dari kedua pernyataan ini, terlihat jelas adanya kolaborasi antara pemerintah, yayasan, dan petani lokal dalam upaya pengembangan ekonomi melalui budidaya kopi Paniai. Program tersebut sudah dimulai dengan sosialisasi dan dialog, yang membantu memastikan pemahaman yang mendalam serta kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam menginisiasi serta memberikan insentif kepada program, sementara yayasan memperkuat

implementasi melalui bantuan teknis dan pendampingan. Kolaborasi yang terjalin menjadi contoh dari prinsip *Collaborative governance* Ansel Dan Ghes, di mana berbagai pihak terlibat aktif untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan ekonomi lokal. Fokus utama program ini adalah mengurangi kemiskinan *Ekstrim* di Paniai. Dengan peran pemerintah yang proaktif dalam memberikan dukungan, insentif dan dukungan finansial, diharapkan masyarakat lokal, terutama petani kopi, dapat semangat dan mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan, membawa dampak positif pada pengentasan kemiskinan *ekstrim* di Paniai.

### **3.2. Membangun Kepercayaan**

Tahap kedua dalam pemerintahan kolaboratif menurut teori Ansell dan Gash adalah membangun kepercayaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Paniai Satu Data BAPPEDA tahun 2022, terdapat kendala dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar bibit kopi yang dibagikan tidak ditanam oleh masyarakat, mungkin karena kurangnya kepercayaan terhadap program pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun program pengembangan kopi Paniai telah dimulai dengan baik, namun masih terdapat tantangan dalam meraih dukungan penuh dari masyarakat. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang efektif tentang tujuan dan manfaat program tersebut. Informasi yang belum tersebar dengan luas menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Pemerintah telah berupaya dengan memberikan insentif dan menggunakan teknologi untuk pemantauan, namun tanpa adanya pemahaman yang cukup dari masyarakat, keberhasilan program ini tetap diragukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang program ini. Dengan pemahaman yang kuat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam program dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan *ekstrim* di Paniai.

### **3.3. Komitmen Terhadap Proses**

Komitmen dalam *collaborative governance* merujuk pada kesediaan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat untuk berkontribusi secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam proses kolaboratif tersebut. Dalam menyukseskan program ini, Dana yang digunakan berasal dari Dana Otsus sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Daud Pigai, dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan merupakan sebuah upaya yang terstruktur dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan *ekstrim*. Kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, menjadi landasan utama dalam kesuksesan program ini. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dana untuk mendukung Yayasan YAPKEMA dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta, seperti YAPKEMA, memberikan peluang langsung bagi masyarakat untuk menjual hasil kopi mereka. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat, program ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Paniai.

### **3.4. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama adalah pondasi yang krusial bagi komunikasi yang efektif dan hubungan yang kuat, baik pada tingkat individu, organisasi, antar organisasi atau lembaga. Ini melibatkan upaya aktif untuk memahami pandangan, perasaan, dan perspektif orang lain, tidak hanya secara intelektual tetapi juga emosional. Ketika individu atau organisasi mengutamakan pemahaman bersama, mereka mampu menemukan kesamaan, menyelesaikan perbedaan, dan

membangun kepercayaan yang solid. Proses ini memerlukan kesabaran, empati, dan keterlibatan aktif dalam mendengarkan dan berbagi. Dengan pemahaman bersama yang kokoh, interaksi antar individu, organisasi, antar organisasi atau lembaga menjadi lebih memuaskan, konflik dapat diatasi atau dihindari secara konstruktif, dan kolaborasi yang produktif dapat terwujud untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas DPMK dan Candra Panjaitan pengelola *Green House* kopi Owa, terlihat bahwa program pengentasan kemiskinan melalui budidaya kopi telah menunjukkan perkembangan positif selama lima tahun terakhir. *Stakeholder*, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, telah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Meskipun demikian, produksi kopi masih terbatas dengan hasil panen yang mencapai 300kg per tahun, menandakan perlunya peningkatan produksi. Penggantian kontrak dengan tim dari Institut Pertanian Bogor menunjukkan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi program. Namun, tantangan utama terletak pada sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dari budidaya kopi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan produksi, kolaborasi dengan institusi yang lebih kompeten, dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

### 3.5. Hasil Sementara

Hasil sementara memberikan gambaran tentang kemajuan penelitian terhadap program dalam mencapai tujuannya pada suatu titik waktu tertentu. Dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Data interim yang terkumpul, seperti pencapaian target sementara, partisipasi, atau dampak awal, memberikan dasar untuk memantau kinerja program dalam konteks penelitian. Dengan memahami hasil sementara dari penelitian terhadap program, peneliti dapat mengoptimalkan analisis dan temuan, serta memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap program yang diteliti.

#### Gambar 1

Peta Hasil Sebaran Lahan Kopi Paniai Berbasis Titik Kordinat



Sumber : Tim Paniai Satu data BAPPEDA Paniai 2022

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa dalam kurun waktu 2021-2022 jumlah kopi yang ter-pantau dalam satelit sekitar 216 kampung yang aktif menanam kopi. Tetapi angka itu meningkat drastis Pada tahun 2022 terjadi peningkatan dalam skala distrik yang ikut berpartisipasi dalam program ini berjumlah 19 distrik dari 24 artinya masih ada 5 distrik yang belum bisa mengikuti program tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan



pihak swasta dalam mempromosikan program penanaman kopi kepada 5 distrik tersebut agar tujuan utama dari pengentasan kemiskinan ekstrim di kabupaten Paniai dapat teratasi.

**Gambar 2** Pembukaan Badan Usaha Milik Daerah BUMD



Sumber : Tim Paniai Satu data BAPPEDA Paniai 2022

Berdasarkan gambar di atas dalam upaya mengembangkan kopi Paniai di tingkat nasional maupun internasional, pemerintah telah melakukan langkah strategis dengan mengadakan uji coba kopi arabika *specialty* yang menghasilkan final skor 84,25, menunjukkan kualitas yang sangat baik. Langkah ini penting karena kopi arabika dengan kualitas spesial dapat menjadi daya tarik di pasar global yang semakin kompetitif. Selain itu, mendirikan enam badan usaha milik daerah yang beroperasi baik di Indonesia maupun Jepang merupakan langkah yang sangat signifikan dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan aksesibilitas kopi Paniai ke pasar internasional yang potensial. Kerja sama lintas negara ini memberikan peluang bagi petani kopi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui ekspor kopi berkualitas tinggi ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan promosi kopi Paniai di pasar global tetapi juga sangat berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

**Gambar 3**  
Hasil Perkebunan Kopi Paniai Periode 2022-2023



Sumber : Tim Paniai Satu data BAPPEDA Paniai 2022

Berdasarkan gambar di atas program pengembangan ekonomi rakyat melalui potensi lokal kopi Paniai dalam prosesnya telah terjadi peningkatan jumlah pohon kopi Paniai sejumlah 27.000 (dua puluh tuju ribu), hasil panen biji kopi sebanyak 300kg dalam kurun waktu 2022. Pada tahun 2023 jumlah pohon kopi Paniai meningkat menjadi 70.000 (tuju puluh ribu). Hasil panen dari masyarakat di jual kepada Koperasi Kopi Owa milik Pemerintah daerah dengan harga Per-kilo sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu). Sedangkan berdasarkan sumber *Website* Paniai mandiri pada tahun 2024 jumlah pohon kopi Paniai mengalami lonjakan drastis menjadi 697.163 ribu dengan jumlah petani kopi berjumlah 832 orang. Sedangkan harga kopi Paniai sendiri di bagi menjadi 3 kelompok yakni kopi ceri per-kilo 10.000 (sepul ribu) sedangkan kopi Paniai dalam kemasan *Green Bean* seharga 150.000 (seratus lima puluh) dan *Roast Bean* di jual dengan harga 500.000 (lima ratus).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua petani kopi, terlihat bahwa program pemerintah telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat lokal di Kabupaten Paniai. Pertama, seorang petani menyampaikan rasa terima kasihnya karena program tersebut telah memberikan kesempatan bagi tiga anaknya untuk meraih gelar sarjana dan memperoleh pekerjaan yang membanggakan, seperti menjadi Asisten Gubernur Papua Tengah, dokter, dan guru SMA. Hal ini menunjukkan bahwa program telah membuka pintu bagi kemajuan pendidikan dan karier bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, dalam wawancara dengan kepala dinas, Yonatan Mote yang terlihat keyakinan yang kuat akan keberlanjutan program. Dia menyatakan bahwa program akan terus berlanjut karena adanya pasar yang telah disediakan untuk menjual hasil panen kopi. Dengan demikian, program ini diharapkan akan terus membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan demikian, kedua wawancara tersebut menegaskan bahwa program pengembangan ekonomi rakyat melalui budidaya kopi Paniai tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah kemiskinan *ekstrim* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal kopi Paniai melalui *collaborative governance* sebagai upaya mengurangi masalah kemiskinan. Penulis menemukan temuan penting yakni, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari 36,63% menjadi 35,39% dalam periode 2022-2023, perubahan ini masih bersifat marginal dan belum memberikan dampak signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari pergeseran posisi, kabupaten Paniai dari peringkat ke delapan menjadi ke enam dalam daftar kabupaten termiskin di Indonesia, yang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal kopi Paniai dan minimnya dukungan pemerintah kepada YAPKEMA untuk melakukan sosialisasi dan promosi program unggulan kopi Paniai secara luas dan menyeluruh. Data menunjukkan bahwa dari 41.425 penduduk miskin di Paniai, hanya 832 orang yang aktif terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat rendah, yang menghambat efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah pemberian Kartu Petani Kopi. Kartu ini digunakan petani untuk mengakses dana insentif sebesar Rp 2.500 per pohon kopi per bulan. Semakin banyak pohon kopi yang ditanam, semakin banyak insentif yang diterima oleh petani. Selain itu, kartu ini juga berfungsi untuk mengakses pengadaan pupuk, alat sistem pertanian, dan sebagai alat transaksi hasil panen. Selanjutnya, pemerintah juga membentuk kelompok tani kopi Owa dengan perwakilan koordinator dari 19 distrik. Kelompok tani ini berfungsi sebagai

penghubung antara pemerintah, YAPKEMA, dan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Tim Komite Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Rakyat dari Institut Pertanian Bogor untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan secara signifikan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan peningkatan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ini. Dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi program, serta kolaborasi yang lebih erat antara semua pemangku kepentingan, sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paniai.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam konteks *collaborative governance* dalam mengurangi masalah kemiskinan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paniai dari 36,63% menjadi 35,39% dalam periode 2022-2023, perubahan ini hanya bersifat marginal dan belum mencapai dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Posisi Kabupaten Paniai yang berpindah dari peringkat ke-8 menjadi ke-6 dalam daftar kabupaten termiskin di Indonesia menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam program pengentasan kemiskinan masih memerlukan peningkatan. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan YAPKEMA adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal kopi Paniai dan kurangnya dukungan pemerintah kepada YAPKEMA untuk memberikan sosialisasi dan promosi terhadap program unggulan kopi Paniai secara luas dan menyeluruh. Data menunjukkan bahwa dari 41.425 jumlah penduduk miskin di Paniai, hanya 832 orang yang aktif terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Kartu Petani Kopi yang digunakan petani untuk mengakses dana insentif sebesar Rp 2.500 per pohon kopi per bulan. Semakin banyak pohon kopi yang ditanam, semakin banyak insentif yang didapatkan. Kartu ini juga digunakan untuk mengakses pengadaan pupuk, alat sistem pertanian, dan sebagai alat transaksi hasil panen (Nawipa et al., 2022). Selain itu, pemerintah membentuk kelompok tani kopi Owa dengan perwakilan koordinator dari 19 distrik sebagai penghubung antara pemerintah, YAPKEMA, dan masyarakat setempat, serta menggandeng Tim Komite Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Rakyat dari Institut Pertanian Bogor. Guna mengurangi angka kemiskinan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, Pemerintah disarankan mengalokasikan anggaran yang cukup kepada Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Yayasan ini dapat berperan penting dalam menyediakan sosialisasi, dialog, dan promosi kepada masyarakat, khususnya dengan bantuan koordinator dari 19 distrik. Melalui sosialisasi yang intensif, diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah, tetapi juga dapat merangsang minat dan partisipasi masyarakat, termasuk menambah jumlah petani kopi yang terlibat dalam program ini. Selain itu, dalam upaya meningkatkan produksi kopi Paniai, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembukaan lahan perkebunan kopi berskala besar yang dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti yang dilakukan oleh pertanian kopi di Brazil. Dengan demikian, selain meningkatkan produksi kopi berskala besar, hal ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Paniai.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Paniai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

*COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. (n.d.).

Saleh, S., Pd, S., & Pd, M. (n.d.). Analisis Data Kualitatif *Editor: Hamzah Upu*.

Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). Collaborative governance dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 294–307.

Amaliah, Y. (N.D.). “*Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Barru*” (*Collaborative Governance In Poverty Reduction In Barru District*).

Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67.

Nawipa, S., Banurea, R. N., & Abidjulu, F. C. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Pulang Kampung Melalui Program Petani Kopi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Paniai. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(4), 1869–1882.

Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77.

Salsabila, L., Sianturi, S., & Sadayi, D. P. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Dialektika Publik*, 6(1), 28–34.

Sapioper, H. C. M., Ilham, I., Kadir, A., Yumame, J., Sriyono, S., Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Patmasari, E. (2022). Emas Merah Paniai: Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 116–126.

Sari, N. D., Rahayu, N. D., Salimah, B. S., Firmansah, N. M. H., & Khoiriawati, N. (2024). Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 14–25.

Undang Undang Dasar Tahun 1945. (n.d.). *Pasal 28C ayat dan Pasal 28H ayat 3*.

Youtube Pertanian Kopi Modern Dari Brasil, Rahasia Dibalik Negara Produksi Kopi Terbesar di Dunia. <https://youtu.be/OwoKxFL43Ec?si=uvzEfngk0mmOaoz0>

